

Keberlanjutan Bisnis Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pertubuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI) Pulau Penang, Malaysia

Sri Marti Pramudena^{1*}, Eri Marlapa², Anton Hidarjo³, Agung Prihatin⁴, Khozaeni Bin Rahmad⁵

¹⁻³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana

^{4,5}Pertumbuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI)Pulau Pinang

Korespondensi Email: dena_pramu@mercubuana.ac.id

Abstract

The Community Service Program (PPM) is entitled Strategy for Assistance in Opening/Developing Businesses for TKI in Malaysia to develop self-actualization and improve family welfare in the area of origin and aims to obtain sustainable income after becoming a TKI in Malaysia. Currently there are several migrant workers opening/developing business capabilities, both small and medium businesses in Malaysia, but there have been no business openings or developments in their home regions in Indonesia. This is deemed necessary because after the work contract is completed, a former migrant worker will return to Indonesia so that his income will decrease or even no longer receive wages and this will be detrimental to the sustainability of his welfare. For this reason, there needs to be a solution to the activities that will be provided, namely by providing information, providing motivation and even providing examples of activities to open a new business or develop a business that has been started previously. With this outreach activity, it is hoped that migrant workers who are still actively working will understand that they have to set aside funds to open/develop new businesses such as small and medium businesses in their home regions in Indonesia, so that they will be prosperous in life. sustainable and sustainable. This implementation will be carried out at the Non-Governmental Organization (NGO) Indonesian Community Organization (PERMAI) Pulau Pinang. The way to carry out the activities is by conducting outreach and training on the implementation of opening/developing new businesses to 50-100 Indonesian workers who are members of the PERMAI NGO in Pulau Pinang, Malaysia.

Keywords: NGO Permai; Small Business; Medium Enterprises

Abstrak

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) bertajuk Strategi Pendampingan Pembukaan/Pengembangan Usaha TKI di Malaysia untuk mengembangkan aktualisasi diri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah asal serta bertujuan untuk memperoleh pendapatan berkelanjutan setelah menjadi TKI di Malaysia. Saat ini terdapat beberapa TKI yang membuka/mengembangkan kemampuan usaha baik usaha kecil dan menengah di Malaysia, namun belum ada pembukaan atau pengembangan usaha di daerah asalnya di Indonesia. Hal ini dirasa perlu karena setelah kontrak kerja selesai, seorang eks TKI akan kembali ke Indonesia sehingga pendapatannya berkurang atau bahkan tidak mendapat upah lagi dan hal ini akan merugikan keberlangsungan kesejahtraannya. Untuk itu perlu adanya solusi terhadap kegiatan yang akan diberikan yaitu dengan memberikan informasi, memberikan motivasi bahkan memberikan contoh kegiatan membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah dirintis sebelumnya. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan para TKI yang masih aktif bekerja memahami bahwa mereka harus menyisihkan dana untuk membuka/mengembangkan usaha-usaha baru seperti usaha kecil dan menengah di daerah asalnya di Indonesia, sehingga sejahtera dalam hidup. berkelanjutan dan berkelanjutan. Implementasi ini akan dilakukan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Organisasi Masyarakat Indonesia (PERMAI) Pulau Pinang. Cara pelaksanaan kegiatannya adalah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan pembukaan/pengembangan usaha baru kepada 50-100 tenaga kerja Indonesia yang tergabung dalam LSM PERMAI di Pulau Pinang, Malaysia.

Kata Kunci : LSM PERMAI; Usaha Kecil; Usaha Menengah

Accepted: 2024-07-11

Published: 2024-10-03

PENDAHULUAN

Memasuki era di mana kesadaran akan dampak lingkungan dan sosial semakin meningkat, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia semakin sadar akan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasi bisnis mereka. Konsep keberlanjutan bukan lagi sekadar tren, tetapi telah menjadi imperatif bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan bertahan dalam jangka panjang.

Bisnis keberlanjutan atau *sustainable business* merupakan bisnis yang dapat dijalankan pada tempo musiman ataupun secara kontinu dalam kurun waktu tahunan. Bisnis berkelanjutan diharapkan tidak hanya memikirkan segi prospek keuntungan saja, tetapi juga memberikan manfaat keberlanjutan untuk bisa dinikmati hingga masa depan (Jorgensen & Pedersen, 2018).

Tuntutan terhadap keberlanjutan bisnis tidak hanya berasal dari konsumen saja, namun berasal dari investor, pemerintah, atau masyarakat luas. Perusahaan-perusahaan dihadapkan pada tekanan untuk mengurangi jejak lingkungan, memperbaiki praktik ketenagakerjaan, mendukung komunitas lokal, dan berkontribusi pada solusi untuk tantangan global seperti perubahan iklim dan kesenjangan sosial.

Untuk itu dibutuhkan adanya inovasi bisnis dengan model keberlanjutan (*sustainable business model innovation*) yang merupakan transformasi pada sebuah bisnis keberlanjutan kepada suatu model bisnis lainnya (Geissdoerfer et al., 2018). Implementasi inovasi bisnis model berkelanjutan memiliki beberapa tantangan seperti diantaranya pola pikir, sumber daya, inovasi teknologi, hubungan eksternal, serta metode dan alat (Evans et al, 2017).

Perusahaan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan mitra bisnis, untuk menciptakan solusi yang lebih efektif terhadap tantangan lingkungan dan sosial. Kemitraan semacam ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses pengetahuan, sumber daya, dan jaringan yang lebih luas.

Non-Governmental Organization atau NGO adalah organisasi nirlaba yang memiliki kepentingan sosial dan lingkungan. Seperti namanya, yang juga dikenal dengan lembaga swadaya masyarakat ini beroperasi secara mandiri tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah.

Karena NGO adalah perusahaan nirlaba, mereka cenderung lebih kolaboratif daripada komersial. NGO sebenarnya menggunakan banyak istilah. Namun yang jelas, lembaga yang tergolong NGO adalah lembaga yang tidak ada hubungan atau pengaturannya dengan pemerintahan dan juga lebih cenderung bersifat nirlaba dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat dan lingkungan terlebih dahulu.

World Bank mengklasifikasikan NGO menjadi dua bagian, yakni Operational NGO dan juga Advocacy NGO.

NGO Operational

Tujuan utama dari dibentuknya jenis NGO ini adalah untuk merancang dan juga menerapkan proyek pengembangan. Mereka akan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk bisa menjalankan proyek dan juga programnya. Proses tersebut biasanya memerlukan organisasi yang kompleks.

Jenis NGO operasional ini lantas terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu organisasi yang berbasis masyarakat, organisasi nasional, dan juga organisasi internasional.

NGO Advokasi

NGO Advokasi dibuat untuk memertahankan dan juga memelihara suatu masalah khusus dan bergerak untuk memengaruhi kebijakan dan juga tindakan pemerintah atas masalah tersebut.

Organisasi ini juga akan berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan masyarakat dengan melakukan lobi, kegiatan pers, dan berbagai aktivitas lainnya.

Pada dasarnya, mereka akan bekerja melalui advokasi atau suatu isu yang tidak mengimplementasikan suatu program. Nantinya, kelompok ini akan menjalankan fungsinya yang hampir sama dengan kelompok operasional, tapi tetap dengan tingkatan dan juga komposisi yang beragam

1. Analisis Situasi

1. LSM PERMAI

Ngo merupakan singkatan dari organisasi non-pemerintah (NGO) sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat sedangkan PERMAI merupakan singkatan dari Persatuan Masyarakat Indonesia Pulau Pinang. Permai adalah sebuah organisasi non-politik non-pemerintah yang anggotanya adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Organisasi ini bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan budaya, anggota organisasi ini berjumlah sekitar 400 orang yang berdomisili di Penang dan Malaysia Utara, tepatnya di tiga negara dari 15 negara yang ada di Malaysia yaitu Penang, Kerda dan Perlis, mereka kantor dan kegiatannya berbasis di Penang, Malaysia Utara. Struktur inti organisasi adalah sebagai berikut:

1. Presiden : Eddy Virgo
2. Wakil Presiden : Khozaen Bin Rahmad
3. Bendahara : Anora Calista
4. Sekretaris Jenderal : Ferdinand Murni Hamundu
5. Ketua Garda Pendidikan : M.Arif Rahman Hakim., PH.D
6. Ketua Garda Kemanusiaan : Muhammad Mukhotib

Anggota organisasi PERMAI terdiri dari komunitas-komunitas dari berbagai lapisan masyarakat dari seluruh pelosok Indonesia dengan latar belakang berbeda-beda yang bermukim di Malaysia, antara lain: Ekspatriat, Pengusaha, Dosen, Guru, Mahasiswa, Pekerja yang berdomisili di Malaysia.

Dalam upaya menjadi inkubator untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai keterampilan atau keahlian khusus agar dapat memperoleh pekerjaan dengan jabatan dan gaji yang lebih tinggi atau setidaknya setara dengan bangsa lain, Permai menyelenggarakan kegiatan pendidikan khusus dan kerjasama.

2. Pekerja Migran

Jumlah WNI yang mengikuti organisasi PERMAI sebanyak 400 orang yang tersebar di 15 negara bagian Malaysia yang berdomisili di Penang dan Malaysia bagian utara. Latar Belakang: Anggota organisasi ini berasal dari kalangan UMKM, pelajar, buruh pabrik, kontraktor restoran non pabrik, bekerja sebagai klinik, OB, cleaner. Upah yang diterima oleh para pekerja tersebut cukup besar jika diterima oleh para pekerja di Indonesia dengan pola kerja yang sama seperti misalnya buruh pabrik, buruh pabrik, buruh pabrik, klinik, pegawai jasa, buruh restoran, buruh rumah tangga, dosen, besarnya. adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Daftar Gaji Pekerja TKI di Malaysia

Nomor	Nama Pekerjaan	Besaran Upah (dalam Rupiah)
1	Buruh pabrik	7-9 juta
2	Pekerja konstruksi upah minimum	10 juta
3	Petugas kebersihan	5-6 juta
4	Pegawai restoran	7-8 juta
5	Upah minimum RT pembantu	4-5 juta
6	Pengajar	15-17 juta
7	Guru Sekolah Dasar	4,5 juta

8	Guru SMA	12 juta
9	Analisis data	15-16 juta

Sumber : Hasil wawancara dengan Manajemen Permai keluarga mereka di daerahnya tanpa memikirkan bagaimana jika kontrak kerjanya berakhir di Malaysia dan mereka tidak mendapatkan penghasilan lain setelah kembali ke Indonesia.

- **Target Partner Location Map**



Tentang Kami



PERMAI Penang
 PPM-006-07-04022019
 Main Office:
 66, Jalan Kuantan, George Town, 10150 George
 Town, Pulau Pinang
 Learning Center:
 2, Jalan Tun Dr Awang, Bukit Jambul, 11900
 Bayan Lepas, Pulau Pinang



Dengan kondisi seperti ini maka pengabdian kepada masyarakat ini akan mencoba memberikan solusi terhadap keadaan tersebut di atas, bagaimana cara menunjuk, menyimpan gaji yang diperoleh untuk membangun aset, menabung atau berinvestasi dari upah/gaji yang telah diperoleh.

1. Memberikan solusi pengelolaan keuangan bagi pekerja migran sesuai dengan MBKM dan IKU yang fokus pada layanan pemberian informasi, motivasi, informasi dan bantuan berkelanjutan untuk kesejahteraan pekerja migran di Malaysia dan setelah kembali ke Indonesia dengan berinvestasi pada usaha kecil atau menengah. Berinvestasi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha kecil. Tujuan pembentukan dan pemberdayaan UMKM tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 3 dan 5. Dengan bunyi sebagai berikut: Pasal 3 "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk mengembangkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan." Pasal 5 "Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :
 - a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, maju dan berkeadilan.
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

yang berketahanan dan mandiri.

c. meningkatkan kesejahteraan peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan”

2. Menawarkan UMKM disesuaikan dengan pendapatan peserta PPM

yang termasuk dalam kriteria usaha tersebut dibagi dalam kriteria penghasilan berikut :

1. Usaha mikro mempunyai kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah dengan hasil penjualan paling banyak 300 juta rupiah per tahun.
2. Usaha kecil mempunyai aset sekitar 50 juta sampai 500 juta rupiah dengan hasil penjualan sekitar 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah per tahun.
3. Usaha menengah mempunyai kekayaan bersih sekitar 500 juta hingga 10 miliar dengan penjualan paling banyak 2,5 miliar hingga 50 miliar per tahun.
5. Usaha kecil dijalankan sendiri atau dengan jumlah pekerja yang sedikit.

6. Keterbatasan modal

3. Partisipasi Mitra dalam Implementasi Program:

Mitra dalam PkM ini berada di Malaysia dan Indonesia, namun dalam kegiatan ini terdapat partisipasi aktif mitra pada setiap tahapan pelaksanaan program. Pertemuan daring dilakukan untuk membahas permasalahan dan solusi bersama. Tim kolaboratif, terdiri dari tim dosen, mahasiswa, dan mitra, bekerja sama untuk merancang dan mengimplementasikan solusi. Partisipasi mitra sangat dihargai dalam lokakarya, pelatihan dan kegiatan implementasi, karena memberikan wawasan langsung mengenai kebutuhan dan harapan mereka.

Masalah Prioritas

Berdasarkan analisis situasi dan wawancara dengan anggota LSM Permai sebagai perwakilan Maka ada 2 permasalahan utama yang dihadapi:

1. Bagaimana TKI mampu menjaga kesejahteraan berkelanjutan berdasarkan upah yang diterimanya sebagai TKI setelah kembali ke Indonesia
2. Bagaimana para pekerja migran mendesain, menyimpan gaji yang dapat membangun aset mereka selama menjadi migran pekerja

Dalam wawancara tersebut disebutkan bahwa umumnya pekerja Indonesia merasa upah yang mereka terima selama ini telah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyalurkan nya ke keluarga di daerah asalnya di Indonesia, padahal mereka sudah berpikir untuk membuka usaha. sebuah bisnis di Indonesia namun hanya sebatas serah terima dana kelolaan. oleh keluarga yang belum memahami cara membuka usaha sendiri.

Dalam pelaksanaan PPM ini diharapkan peserta termotivasi dan memperhatikan pengeluaran keuangannya serta mulai untuk berinvestasi di daerah asalnya di Indonesia, dan dengan investasi tersebut dapat memberikan manfaat bisnis sehingga ketika kembali ke Indonesia dan jangan jadi TKI, mereka akan tetap sejahtera karena mempunyai usaha usaha yang menunjang hari tua mereka sebagai mantan TKI.

Peran dan tugas masing-masing anggota tim

Tim pelaksana terdiri dari ketua pelaksana, dosen dan mahasiswa. Kepala eksekutif bertanggung jawab atas koordinasi umum dan pemantauan keseluruhan program. Dosen membantu dalam perencanaan teknis dan koordinasi, sedangkan Peserta kegiatan PPMterlibat dalam kegiatan lapangan, mendukung logistik, dan membantu pelaksanaan lokakarya .

Potensi Pengakuan bagi Siswa

Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan ini berpotensi memperoleh pengakuan yang

signifikan. Sertifikat pengabdian masyarakat diberikan kepada siswa yang berpartisipasi dengan baik, mengakui kontribusi mereka terhadap pengembangan masyarakat. Hal ini tidak hanya sekedar penghargaan, namun juga menjadi penyemangat bagi Peserta kegiatan PPM untuk terus terlibat dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat.

METODE

Dalam pelaksanaan PKM ini menggunakan metode ceramah untuk memotivasi dan menginformasikan UMKM yang dapat dilakukan oleh ex TKI dan di akhiri dengan diskusi selanjutnya dilakukan evaluasi pengukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut dengan cara peserta mengisi kuisioner keterserapan tentang pelaksanaan PKM ini.

Metode yang dilakukan dalam PPM ini tergambar sebagai berikut :



1. Pelaksanaan kegiatan PKM

Dalam pelaksanaan PKM ini, narasumber akan menjelaskan dan mentransfer ilmu serta mengarahkan bagaimana peserta memahami manfaat usaha dan bagaimana menerapkan strategi agar usaha berhasil sesuai yang diharapkan. Penyampaian materi akan dilakukan secara berkelompok sebanyak 50 orang TKI dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Bagaimana membuka usaha baru dan mengembangkannya
2. Bagaimana TKI merancang aset, menyimpan gaji yang dapat membangun aset yang dimiliki TKI

Upah gaji

Pada kegiatan ini peserta diminta untuk ikut serta dalam pelaksanaan program kegiatan ini dengan memberikan informasi mengenai passion mereka untuk memudahkan dalam memulai usaha.

2. Diskusi

Setelah memberikan materi peserta PKM di ajak berdiskusi tentang kondisi dari setiap peserta baik material maupun situasi kerja yang mereka jalani bagaimana mereka mampu menjaga kesejahteraan berkelanjutan berdasarkan upah yang diterimanya sebagai TKI setelah kembali ke Indonesia dan Bagaimana TKI merancang aset, menyimpan gaji yang dapat membangun aset yang dimiliki TKI

3. Evaluasi dan keberlanjutan program

Dalam kegiatan PKM ini keberhasilan pemahaman materi yang disampaikan akan dievaluasi dengan memberikan angket sebelum materi diberikan dan dievaluasi dengan memberikan angket dan menilai pemahaman setelah diberikan materi.

Peran dan tugas masing-masing anggota tim

Tim pelaksana terdiri dari ketua pelaksana, dosen dan mahasiswa. Kepala eksekutif bertanggung jawab atas koordinasi umum dan pemantauan keseluruhan program. Dosen membantu dalam perencanaan teknis dan koordinasi, sedangkan Peserta kegiatan PPM terlibat dalam kegiatan lapangan, mendukung logistik, dan membantu pelaksanaan lokakarya.

Potensi Pengakuan bagi Siswa:

Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan ini berpotensi memperoleh pengakuan yang signifikan. Sertifikat pengabdian masyarakat diberikan kepada siswa yang berpartisipasi dengan baik, mengakui kontribusi mereka terhadap pengembangan masyarakat. Hal ini tidak hanya sekedar penghargaan, namun juga menjadi penyemangat bagi Peserta kegiatan PPM untuk terus terlibat dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumentasi kegiatan yang dikumpulkan selama pelaksanaan PKM menunjukkan partisipasi aktif anggota organisasi PERMAI di Penang dan Malaysia bagian utara. Lebih dari 50 hingga 100 pekerja Indonesia mengikuti kegiatan yang meliputi sosialisasi, diskusi, penugasan, dan evaluasi. Melalui berbagai metode tersebut, peningkatan pemahaman terhadap perkembangan aktualisasi diri di tempat kerja tercapai.



Selama pelaksanaan program, terjadi diskusi mendalam mengenai tantangan yang dihadapi TKI di Malaysia, khususnya terkait kualitas sumber daya manusia, produktivitas, pendidikan, dan keterampilan. Program ini memberikan solusi konkrit Terbukti dengan meluasnya diskusi bagaimana upaya yang akan dilakukan ketika TKI berminat menginvestasikan dana/upah mereka selama bekerja sebagai TKI dan memilih untuk membuka usaha baru dan mengembangkannya



Evaluasi hasil PKM menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada efikasi diri atau kepercayaan diri dalam perencanaan karir pada pekerja Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong perencanaan karir dan bisnis yang lebih baik untuk masa depan mereka. Selain itu, PKM juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan organisasi kemasyarakatan melalui publikasi ilmiah, video dokumentasi kegiatan, jurnal PKM, dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, PKM berhasil memberikan intervensi berorientasi ke bawah dan psikoedukasi untuk meningkatkan efikasi diri di kalangan pekerja Indonesia di Malaysia, dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan mereka bersaing dengan pekerja asing lainnya dan berkontribusi terhadap kesejahteraan pribadi dan keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurnia RS (2021), dua puluh tig acara membuka usaha sendiri . 23 Cara Membuka Usaha Sendiri di Rumah agar cepat sukses .
- Kristiyanti Mariana (2012), Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional. Majalah Ilmiah INFORMATika Vol. 3 No.1, Januari 2012
- Ramdani Riko (2019): Enam stategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, Tips Bisnis, Akseleran <https://www.akseleran.co.id/blog/pengembangan-usaha-kecil-menengah>
- Sulistiyo Hari (2020), Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah sektor industri pengolahan kabupaten Bekasi Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7 No.2 September 2020 P - ISSN E - ISSN : 2503-4413 : 2654-5837, Hal 38 – 48
- Choirul Hamidah dan Umi Farida (2017), "Analisis Prioritas Investasi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo," Jurnal Akuntansi, 1 (2017), 97.
- Sitti Hatidjah, et.,all (2017), "Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Di Kota Makassar," Jurnal Economix, 2.8
- V. Wiratna Sujarweni (2015), Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 21-22.